



MENEJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMK KESEHATAN JAYA DHARMA

Siti Aisyah¹, Miftahul Huda², Nurul Hidayati Murtafiah³

¹⁻³Institut Agama Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email : Sitiaisyah041971@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas system pembiayaan pada SMK Kesehatan Jaya Dharma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini di khususkan untuk menggali gagasan atau ide kepala sekolah atau madrasah, bendahara sekolah, kemudian di interprestasikan dengan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pembiayaan pada SMK Kesehatan Jaya Dharma melalui subsidi silang dengan siswa yang kurang mampu dan siswa yang mampu berbeda. Hal ini sebabkan untuk menutupi kekurangan pembiayaan sehingga pembiayaan tetap stabil. Pendanaan sekolah selain dari dana BOS sekolah juga melakukan iuran masyarakat atau SPP. Penggunaan anggaran sekolah meliputi delapan standar pendidikan yaitu: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana prasarana, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.

Kata kunci : Menejemen pembiayaan, Pendidikan, SMK

Abstract: The purpose of this study is to find out more clearly the financing system at Jaya Dharma Health Vocational School. This research uses a qualitative approach in which this approach is devoted to exploring ideas or ideas from school or madrasa principals, school treasurers, then interpreted with existing theory. The results of the study show that the financing system at Jaya Dharma Health Vocational School is through cross-subsidies with students who are less well off and students who can afford it are different. This is caused to cover the shortage of financing so that financing remains stable. School funding apart from school BOS funds also includes community contributions or SPPs. The use of the school budget includes eight education standards, namely: (1) content standards, (2) graduate competency standards, (3) process standards, (4) educator and education staff standards, (5) management standards, (6) infrastructure standards, (7) financing standard and (8) valuation standard.

Keywords: Finance management, Education, Vocational high school

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan (*financing of education*) merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua negara di dunia. (Sonedi et al., 2017) Negara-negara berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relatif lebih rendah dibanding negara-negara maju. (Waliyah et al., 2021) Rendahnya pembiayaan pendidikan di negara berkembang tersebut sudah menjadi wacana public (*public discourse*) yang setiap saat selalu ingin dicarikan jalan keluar.



Pentingnya pembiayaan pendidikan jelas sebagai salah satu hal fundamental dalam menjalankan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah, tanpa adanya pembiayaan yang dikelola dengan baik akan menghambat seluruh lini kegiatan di sekolah seperti pengadaan sarana dan prasarana, honor guru dan tenaga pendidikan, serta bangunan.(Fauziah, 2014)

(Matin, 2014), mengatakan bahwa penggunaan dana satuan biaya pendidikan terbesar adalah biaya operasinal, biaya non operasional dan biaya investasi serta terdapat kolerasi positif dan signifikan antara standar biaya pendidikan dengan kompetensi peningkatan mutu pembelajaran guru. Berbeda dengan penelitian (Moch 2014), menyimpulkan bahwa biaya non personalia masih belum sesuai dengan standar biaya operasi non personalia. Sejalan dengan paparan tersebut (Dedi 2018), menyatakan bahwa belum pernah dilakukan perhitungan pada biaya non personalia karena belum tahu dengan standar pembiayaan pendidikan.

Saat ini, sumber pembiayaan yang diperoleh SMK, sangat beragam, ada yang murni dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan iuran dari masyarakat berupa SPP, bagi sekolah yang tidak mau menerima BOS. Bagi SMK yang menerima dana BOS, pada SMK per siswa pertahun adalah sebesar Rp. 1.400.000,00. Dana tersebut memiliki aturan baku yang dibuat oleh pemerintah guna mengatur alokasi dana. Hal ini pula yang menuntut kepala sekolah selaku pengambil keputusan harus dapat melakukan fungsi manajemennya terhadap pembiayaan sekolah secara optimal.

SMK Kesehatan Jaya Dharma merupakan salah satu SMK yang ada di Way Kanan, SMK ini memberlakukan system SPP yang merupakan iuran dari masyarakat, dimana sekolah menjalankan system Subsidi silang, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas system pembiayaan pada SMK Kesehatan Jaya Dharma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini di khususkan untuk menggali gagasan atau ide kepala sekolah atau madrasah, bendahara sekolah, kemudian di interprestasikan dengan teori yang ada. Arikunto (200:142) penelitian ini merupakan penelitian kasus. Penelitian kasus kalau ditinjau dari wilayahnya hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Akan tetapi apabila ditinjau dari sifat penelitiannya maka penelitian kasus lebih



mendalam. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara sekolah dan guru sekolah di SMK Kesehatan Jaya Dharma.

Instrument Penelitian dalam penelitian ini adalah form wawancara yang ditujukan kepada Kepala Sekolah, Bendahar Sekolah dan guru-guru di SMK Kesehatan Jaya Dharma. Wawancara ini untuk mendapatkan informasi pengelolaan pembiayaan yang ada di SMK Kesehatan Jaya Dharma. teknik wawancara kualitatif berlangsung “luwes”, arahnya bisa lebih terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak sehingga diperoleh informasi yang lebih kaya. Metode wawancara kualitatif menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Hal ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan wawancara, penggalan data dan informasi. Selanjutnya tergantung improvisasi di peneliti di lapangan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kajian teori bahwa manajemen pembiayaan pendidikan meliputi tiga unsur penting yaitu perencanaan anggaran (budgeting), pelaksanaan anggaran (accounting) dan evaluasi anggaran (evaluating). Akan tetapi, sebelum membahas ketiga hal tersebut akan diuraikan tentang bagaimana sumber pendapatan sekolah. Karena hal ini sangat penting dilakukan bagi para pimpinan sekolah demi terwujudnya program kerja yang telah direncanakan.

1. Sumber Pendapatan Sekolah Setiap lembaga pendidikan pasti mempunyai berbagai sumber pendapatannya. Baik sekolah yang berstatus negeri maupun swasta harus mempunyai strategi dalam penggalan sumber-sumber pendapatannya. Tanpa adanya sumber pendapatan, maka bisa dipastikan, lembaga pendidikan tersebut akan mengalami kehancuran. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, setiap sekolah harus cerdas dalam menggali sumber-sumber pendapatan sekolah. Adapun sumber-sumber pendapatan sekolah adalah sebagai berikut:

a) Dana Pemerintah

Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah dikenal dengan istilah dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Dana BOS tersebut terdiri dari dua macam, yaitu BOS pusat dan BOS daerah (BOSDA). Untuk jenjang SMK, penerimaan dana dihitung dari jumlah siswa. Dalam setahun setiap siswa menerima dana BOS sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, semua sekolah baik negeri maupun swasta menerima dana BOS yang sama besarnya.

b) Sumbangan Masyarakat



Dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, terutama sekolah yang berstatus swasta, maka kebutuhannya semakin tinggi. Apabila hanya mengandalkan dana BOS saja maka sangatlah kurang, sehingga sekolah-sekolah swasta mencari strategi bagaimana agar kebutuhan sekolah dapat terpenuhi. Strategi yang dimaksud adalah melakukan penggalangan dana kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua siswa. Dana dari orang tua siswa tersebut dibagi menjadi dua, yaitu SPP yang sifatnya bulanan dan Dana Pendidikan yang sifatnya tahunan. Setiap sekolah berbeda-beda dalam menentukan besaran biayanya. Di SMK Kesehatan Jaya Dharma, system iuran masyarakat atau SPP berbeda setiap siswa. Di SMK Kesehatan Jaya Dharma menerapkan system subsidi silang yaitu anak yang kurang mampu akan berbeda system pembayarannya dibandingkan anak yang mampu dalam hal finansial.

Di SMK Kesehatan Jaya Dharma, siswa yang kurang mampu dikenakan SPP sebesar 200 per bulan sedangkan bagi anak yang mampu maka akan dikenakan biaya lebih mahal. Hal ini terlihat bahwa system SPP pada sekolah ini memang lebih mahal di bandingkan dengan sekolah negeri.

Tabel 1 Jumlah sumbangan Orangtua Siswa

No.	Siswa	Spp bulanan	SPP per tahun
1	Siswa kurang mampu	Rp. 200.000,00	Rp. 3.600.000,00
2	Siswa mampu	Rp. 350.000,00	Rp. 4.200.000,00

Sumber : Bendahara sekolah

Dari table diatas, masing-masing siswa memiliki SPP yang beragam, mulai dari Rp. 200.000,00- Rp. 350.000,00 perbulannya. Hal ini dapat dilihat bahwa kepala sekolah mengambil kenijakan bahwa setiap anak berhak untuk melanjutkan pendidikan baik yang kurang mampu sekalipun. Dilihat dari status sekolah yang swasta memang sekolah swasta lebih rendah diminati dibandingkan sekolah negeri. Hal ini terlihat banyaknya siswa yang mendaftar sekolah disekolah negeri dibandingkan swasta. Untuk hal ini, pihak swasta harus lebih kreatif dan efesien dalam meningkatkan mutu pendidikan.

SMK merupakan sekolah kejuruan, mempersiapkan siswa untuk langsung bekerja setelah lulus dari jenjang tersebut. Untuk SMK swasta pembayaran guru honor dan pembiayaan lainnya tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja, tetapi ada iuran masyarakat atau SPP. Selain untuk pembiayaan lainnya SPP juga digunakan untuk membayar gaji guru honor yang bekerja pada sekolah tersebut. Hal ini terlihat gaji guru di Lampung khususnya masing sangat rendah.



Kepala sekolah juga menyatakan bahwa pembiayaan sekolah tidak tetap setiap tahunnya tergantung banyaknya jumlah siswa. Apalagi sekolah swasta, dimana lebih banyak mengandalkan uang SPP. Di zaman pasca pandemic sekarang siswa berkurang sehingga pembiayaan pun di terapkan hanya untuk yang urgent saja.

Komponen pertama dalam pembiayaan pendidikan adalah biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. Fatah (2012), menjelaskan bahwa biaya personalia merupakan biaya pegawai, sedangkan biaya non personalia adalah biaya operasional bukan pegawai. Indikator biaya operasional yang pertama adalah kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan hasil analisis di atas pembiayaan pendidikan yang masih dialokasikan oleh beberapa sekolah yaitu: (1) insentif tambahan bagi guru PNS dari Pemda Kabupaten; (2) insentif tambahan bagi tenaga administrasi di sekolah dari Pemda Kabupaten; (3) honor bagi guru bantu dari sekolah; (4) hadiah hari raya dari sekolah untuk guru; dan (5) alokasi uang lembur dari sekolah bagi tenaga administrasi. Pembiayaan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak dialokasikan untuk honor bagi guru yang kelebihan jam mengajar dari sekolah, biaya perjalanan dari sekolah untuk proses mutasi/promosi guru, dan biaya untuk pakaian seragam guru.

Sekolah dengan sumber pendanaan dari pemerintah mengharuskan kepala sekolah untuk mampu menjalankan tugas manajerialnya dalam bidang keuangan. Manajemen pembiayaan mengupayakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi bagi setiap kegiatan pembelajaran dari sektor pembiayaan. Pemahaman terhadap tahapan manajemen pembiayaan diperlukan sekali karena dengan pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien, setiap kegiatan pembelajaran mampu ditunjang keberhasilannya, sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan.

Rencana anggaran dalam dunia pendidikan disusun selama setahun sekali. Rencana anggaran ini lebih dikenal dengan istilah RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Di SMK Kesehatan Jaya Dharma, Pelaksanaan anggaran seyogyanya tidak melenceng dari apa yang sudah direncanakan, dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Perencanaan anggaran itulah yang menjadi rujukan awal dalam melangkah ke tahap pelaksanaan anggaran, sehingga pengelolaannya sesuai dengan garis-garis atau rambu-rambu yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, kepala SMK Kesehatan Jaya Dharma mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran di sekolah tidak bisa lepas dari delapan standar pendidikan. Delapan standar pendidikan yang dimaksud adalah (1) standar isi, (2) standar kompetensi



lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana prasarana, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.

Meskipun sekolah SMK Kesehatan Jaya Dharma merupakan sekolah swasta, sejauh ini pembiayaan pada sekolah tersebut masih stabil dan masih berjalan hingga sekarang. Sekolah dengan sumber pendanaan dari pemerintah mengharuskan kepala sekolah untuk mampu menjalankan tugas manajerialnya dalam bidang keuangan. Manajemen pembiayaan mengupayakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi bagi setiap kegiatan pembelajaran dari sektor pembiayaan. Pemahaman terhadap tahapan manajemen pembiayaan diperlukan sekali karena dengan pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien, setiap kegiatan pembelajaran mampu ditunjang keberhasilannya, sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa system pembiayaan pada SMK Kesehatan Jaya Dharma melalui subsidi silang dengan siswa yang kurang mampu dan siswa yang mampu berbeda. Hal ini sebabkan untuk menutupi kekurangan pembiayaan sehingga pembiayaan tetap stabil. Pendanaan sekolah selain dari dana BOS sekolah juga melakukan iuran masyarakat atau SPP. Penggunaan anggaran sekolah meliputi delapan standar pendidikan yaitu: (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar pengelolaan, (6) standar sarana prasarana, (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah. (2014). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan kemandirian Pesantren Salaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan)*.
- Dedi, dkk. (2018). *Menejemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah Menengah Kejuruan*. Jurnal Penelitian Pendidikan.17(3) 256-257.
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moch. Idochi Anwar. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu)*. Bandung: Alfabeta.



- Sonedi, S., Jamalie, Z., & Majeri, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat. *Fenomena*, 9(1), 25. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>
- Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77-98. <https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.272>